ABSTRAK

Evi Nur Baiti, NIM 17104153109, ‘’Pandangan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Daerah Kabupaten Jombang)’’, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2019, Pembimbing: Dr. Iffatin Nur, M. Ag

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Kepemimpinan, Kepala Daerah Perempuan, Hukum Positif dan hukum Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peningkatan kontestasi perempuan di ranah politik. Sebanyak 59 kepala daerah perempuan telah menjadi pemimpin di daerahnya. Pada tahun 2018 hasil pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Jawa Timur menunjukan ada 19 perempuan yang mencalonkan dirinya sebagai Kepala Daerah, dan 5 diantaranya berhasil menjadi pemenang. Salah satunya adalah Ibu Hj. Mundjidah Wahab kepala daerah Kabupaten Jombang. Perempuan pada umumnya masih dipandang sebagai sosok feminim yang mengharuskannya untuk bersikap dan berperilaku sebagaimana mestinya seperti menjaga dan merawat anak di rumah, membantu pekerjaan orang tua di rumah dan lain-lain. Dalam agama Islam juga diajarkan bagaimana menjadi perempuan *sholeha* diantaranya adalah harus bisa membatasi diri dengan kaum laki-laki selain *mahrom*, jika sudah memiliki suami harus patuh dan taat terhadap suami daripada orang tua, keluar rumah harus mendapatkan izin dari suaminya karena suami adalah pemimpin baginya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik bagaimana jika kepemimpinan kepala daerah perempuan langsung dihubungkan dengan pandangan masyarakat yang dipimpinnya. Sehingga pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan merupakan bagian penting dalam konteks penelitian ini baik perspektif hukum Positif maupun hukum Islam dengan studi kasus di daerah kabupaten Jombang.

Fokus penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pandangan masyarakat Jombang terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan, yang kedua bagaimana pandangan masyarakat Jombang terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan perspektif hukum positif, dan yang ketiga adalah bagaimana pandangan masyarakat Jombang terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan perspektif hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Jombang terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan, yang kedua untuk mengetahui pandangan masyarakat Jombang terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan perspektif hukum positif, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Jombang terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) dan studi kasus, dan rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi *participant*, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi dan gabungan dari ketiganya yaitu triangulasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Miles and Huberman*, yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sedangkan aktivitas analisis data dalam penelitian ini meliputi *data reduction* atau reduksi data, *data display* atau penyajian data dan *Conclusion drawing* yaitu penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap adanya kepemimpinan kepala daerah perempuan adalah diperbolehkan. Mereka mau memilih serta mendukung sebab, bagi mereka untuk menjadi kepala daerah bukan dilihat dari gendernya, tetapi lebih dilihat dari profilnya yang baik, sikap yang dimilikinya seperti disiplin, tegas, jujur, amanah dan sangat ramah terhadap masyarakat khususnya kalangan bawah, serta mampu memiliki hasil kinerja yang bagus. Kemudian pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan perspektif hukum positif pada dasarnya tidak menyalahi satupun aturan perundang-undangan. Sebab, di dalam aturan perundang-undangan tidak ada yang melarang perempuan menjadi kepala daerah serta tidak ada larangan terhadap tindakan masyarakat untuk memilih dan mendukung kepemimpinan kepala daerah perempuan. Dan yang terakhir adalah pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan perspektif hukum Islam memang terdapat sebuah perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Tetapi dalam syariat Islam baik secara tekstual maupun kontekstual tidak ada yang memberikan ketentuan secara tegas dan *clear* mengenai hal itu. Sehingga, bisa dikatakan bahwa tidak ada larangan terhadap perempuan untuk menjadi seorang kepala daerah. Karena, laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah yang dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal.

ABSTRACT

Evi Nur Baiti, NIM 17104153109, "People's Views on the Leadership of Female Regional Head of Positive Law and Islamic Law Perspective (A Case Study of Jombang Regency)", Department of Constitutional Law, IAIN Tulungagung, 2019, Advisor: Dr. Iffatin Nur, M. Ag

Keywords: People's Views, Leadership, Female Regional Head, Positive Law and Islamic law.

This research was motivated by an increase in women's contestation in political circles. As many as 59 female regional heads have become leaders in their respective regions. In 2018 the results of regional head elections (Pemilihan Kepala Daerah or PILKADA) in East Java showed that 19 women nominated themselves as Regional Heads, and five of them managed to become winners. One of them was Ms. Hj. Mundjidah Wahab, the head of Jombang Regency. Women in general are still seen as feminine figures that require them to behave as they should, such as caring for children at home, helping the work of parents, and others. In Islam, it is also taught how to become a *sholeha* woman including being able to limit themselves to men other than *mahrom*, if she already has a husband, she must obey her husband rather than parents, leaving the house must get permission from her husband because her husband is the leader for her. This made the writer interested in particular issue if the leadership of female regional head is directly linked to the views of the community she leads. So that the people's view of the leadership of the female regional head is an important part of the context of this research, both in the positive and Islamic law perspective with a case study in Jombang regency.

The first focus of this research was how the Jombang people's views on the leadership of the female regional head. The second was how the Jombang people's views the leadership of the female regional head of a positive legal perspective, and the third was how the Jombang people's views the leadership of the female regional head of Islamic law perspective.

The purpose of this research was to find out Jombang people's view towards the leadership of female regional heads. The second was to find out the Jombang people's view towards the leadership of female regional head of a positive legal perspective, and the third is to find out the Jombang people's views towards the leadership of female regional head of a legal perspective Islam.

The research method used by researchers was a qualitative research approach, the type of research used was field research and a case study, and the research design used was a single case study. The data collection techniques used in the study was participant observation, in-depth interviews, and documentation studies and a combination of the three which was triangulation. The data analysis model used in this study was the Miles and Huberman's model, where the activities in qualitative data analysis were carried out interactively and continuously until it

was complete, so the data was saturated. Meanwhile, the data analysis activities in this study included data reduction, data display and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the people's view of the existence of the leadership of female regional head is permissible. They wanted to choose and support the leadership of the female regional head because, for them to become regional heads are not seen from their gender, but rather from a good profile, attitudes such as discipline, firmness, honesty, trustworthy and very friendly to community, especially the lower classes, and are able to have good performance results. Then the second, the people's view of the leadership of the female head of the positive law perspective basically does not violate any legislation. Because there is no law and regulation that prohibit female from becoming regional heads and there is no prohibition against the actions of the community to elect and support the leadership of the female regional head. And the last, the people's view towards the leadership of the female head of the Islamic law perspective indeed contains a difference of opinion which some were permissible and were not. In Islamic, both textually and contextually related to the problem of the leadership of the female head of region, there is no one who provides clear provisions. Based on this, it can be said that there is no prohibition against women to become a regional head. Because both men and women are equal to God's creations which are made into nations and tribes to know each other.

الملخص

إيفى نور بيتي, رقم القيد ١٧١٠٤١٥٣١٠٩, "نظرة المجتمع للقيادة الإقليمية للمرأة من منظور القانوني الإيجابي والقانون الإسلامي (دراسة حالة لمقاطعة جومبانج)", وجهة القانون الدستوري, جامع الإسلاميّة الحكوميّة تولونج اكوع, تحت المشرف دوكتور إفّة النور الماجستير.

الكلمات الرئيسية: نظرة المجتمع, القيادة, رئيس الإقليمي للمرأة, القانوني الإيجابي والقانون الإسلامي

الدافع وراء هذا البحث هو زيادة المنافسة النسائية في المجال السياسي. أصبح ما يصل إلى ٥٩ رئيسة إقليمية من النساء قائدات في مناطقهن. في عام ٢٠١٨ أظهرت نتائج انتخابات الرؤساء الإقليمية في الجاوى الشرقية أن ١٩ امرأة رشحت أنفسهن كرؤساء إقليميين, ونجحت ٥ منهن في الفوز. واحد منهم هي السيدة الحاجّ منجده وهاب رئيس مقاطعة جومبانج. لا تزال النساء بشكل عام ينظر إليهن على أنهن شخصيات أنثوية تتطلب منهن التصرف والتصرف كما ينبغي مثل رعاية الأطفال في المنزل و رعايتهم, والمساعدة في عمل الوالدين في المنزل وغيرهم. في الإسلام يتم تعليمها أيضًا كيف تصبح امرأة صالحة من بين أمور أخرى يجب أن تكون قادرًا على قصر نفسها على الرجال غير محرم, إذا كان لديها زوج يطيع ويطيع زوجها بدلاً من والديها, فيجب أن تحصل على إذن من زوجها لأن الزوج قائد عليها. هذا ما يجعل الكاتب يهتم بما إذا كانت قيادة رئيسة المنطقة مرتبطة مباشرة بآراء المجتمع التي يقودونها. بحيث تعتبر وجهة نظر الجمهور لقيادة رئيسة المنطقة جزءًا مهمًا من سياق هذا البحث سواء من منظور القانون الإيجابي أو الشريعة الإسلامية مع دراسات الحالة في مقاطعة جومبانج.

التركيز الأول في هذا البحث هو كيف ينظر مجتمع جومبانج إلى قيادة الإقليمية للمرأة, و الثاني هو كيف ينظر مجتمع جومبانج إلى قيادة رئيسة المرأة من منظور قانوني إيجابي, و الثالث هو كيف ينظر مجتمع جومبانج إلى قيادة رئيسة المرأة من منظور الشريعة الإسلامية.

المقصود الأول في هذا البحث هو لمعرفة نظرة مجتمع جومبانج إلى قيادة الإقليمية للمرأة, و الثاني هو لمعرفة نظرة مجتمع جومبانج إلى قيادة رئيسة المرأة من منظور قانوني إيجابي, و الثالث هو لمعرفة نظرة مجتمع جومبانج إلى قيادة رئيسة المرأة من منظور الشريعة الإسلامية.

طريقة البحث المستخدمة من قبل الباحث هي نهج بحثي نوعي, ونوع البحث المستخدم هو البحث الميداني ودراسات الحالة, وتصميم البحث المستخدم هو دراسة حالة واحدة. كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في البحث مراقبة المشاركين و المقابلات المتعمقة و دراسات التوثيق ومجموعة من الثلاثة و هي التثليث. نموذج تحليل البيانات المستخدم في هذا البحث هو نموذج مايلز و هوبرمان, أي الأنشطة في تحليل البيانات النوعية يتم تنفيذها بشكل تفاعلي ومستمر حتى اكتمالها, لذلك يتم تشبع البيانات. في حين أن أنشطة تحليل البيانات في هذا البحث تشمل الحد من البيانات, عرض البيانات, و استخلاص النتائج.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن رؤية المجتمع لوجود قيادة إقليمية للإناث مسموح بها. إنهم يريدون الاختيار والدعم لأن لكي يصبحوا رؤساء إقليميين لا ينظر إليهم من جنسهم, ولكن من المواقف الجيدة, المواقف لديهم مثل الانضباط و الحزم و الصدق و الجدارة بالثقة و ودية للغاية للمجتمع, وخاصة الطبقات الدنيا, والقدرة على تحقيق النتائج أداء جيد. ثم آراء الناس على قيادة رئيسة الإناث من منظور القانون الإيجابي أساسا لا تنتهك أي تشريع. لأنه لا يوجد في التشريع شيء يمنع المرأة من أن تصبح رئيسة إقليمية وليس هناك أي حظر على تصرفات المجتمع لانتخاب و دعم قيادة رئيسة المنطقة. والأخير هو رأي المجتمع تجاه قيادة القائدة الأنثى لمنظور الشريعة الإسلامية هناك بالفعل اختلاف في الرأي, بعضها مسموح به وغير مسموح به. ولكن في الشريعة الإسلامية لا يوجد نص صريح و واضح حول هذا النص. لذلك, يمكن القول أنه لا يوجد حظر على المرأة أن تصبح رئيسة إقليمية. لأن الرجال والنساء على حد سواء هم مخلوقات الله الذين تحولوا إلى أمم وقبائل لمعرفة بعضهم البعض.